

**ANALISIS PENETAPAN PUSAT
PERTUMBUHAN BARU DI SATUAN WILAYAH
PEMBANGUNAN (SWP) TENGAH
KABUPATEN BREBES**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

RAHMAT ANDI YULIANTO

NIM. 12020110141011

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rahmat Andi Yulianto
NIM. : 12020110141011
Fakultas/Jurusan : EKONOMIKA DAN BISNIS/IESP

Judul Usulan Penelitian : **ANALISIS PENETAPAN PUSAT
PERTUMBUHAN BARU DI SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP)
TENGAH KABUPATEN BREBES**

Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Semarang, 29 Januari 2015

Dosen Pembimbing,

(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP)

NIP. 196104161987101001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rahmat Andi Yulianto
NIM. : 12020110141011
Fakultas/Jurusan : EKONOMIKA DAN BISNIS/IESP

Judul Usulan Penelitian : **ANALISIS PENETAPAN PUSAT
PERTUMBUHAN BARU DI SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP)
TENGAH KABUPATEN BREBES**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Februari 2015

Tim Penguji

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)
2. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si. (.....)
3. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rahmat Andi Yulianto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 29 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,

Rahmat Andi Yulianto
NIM. 12020110141011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bermimpilah setinggi langit, walaupun kalian tidak mencapai langit setidaknya kalian melewati ribuan bintang, dan Tuhan memelihara ketidakpastian itu pada seluruh umat manusia agar manusia terus belajar dan terus bermimpi. Apapun itu, cobaan, kekalahan, kegagalan, tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Tapi, tergantung bagaimana kita menyikapinya.”

(Novel Trilogi 5 cm)

“Karena sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya” (Al-Baqarah: 286)

“Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

KELUARGA TERCINTA, SAHABAT – SAHABATKU,

ALMAMATER UNIVERSITAS DIPONEGORO, DAN

MASYARAKAT KABUPATEN BREBES

ABSTRACT

Brebes regency regulation number 2 section 12 (2011) establishes the policy of special region plan year 2010–2030. It concerns to central service system or local center activity that has service scale of unit development area. Includes Brebes sub district (units of north development region), Ketanggungan subdistrict (units of middle development region), and Bumiayu subdistrict (units of south development region). However from those three areas, units of central development region is still left behind area. It can be seen from several indicators such as capital income, accessibility and requires public facilities and un-operate of local center activity in Ketanggungan subdistrict.

The purpose of this research is clasificating the units of middle development region on Brebes Regency using Typolpgy Klassen method. It is used for understanding the scale of interaction among units of middle development region. By monitoring citizen movement in using public facilities. And than understanding of which subdistrict able to be determined as central new development to force economic grawot in units of middle development region by using Skalogram method.

The result of this research conclude there's three of six subdistrict in units of middle development region are included in un-develop area. Those are Songgom, Banjarharjo, and Larangan subdistrict. Then from special scale interaction, Jatibarang and Larangan subdistrict have an attraction for units of middle development region on Brebes Regency to other's subdistrict society. On the other hand, the result of Skalogram analisis Jatibarang and Larangan subdistrict, constitute subdistrict with the number and type of facilities most complete at units of middle development region on Brebes Regency, concern to facilities requirement, Jatibarang and Larangan subdistrict able to be determined as central new development at units of middle development region on Brebes

Regency.Keywords: Growth Center, Spatial Interaction, Typology Klassen, Kalogram.

ABSTRAKSI

Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 pasal 12 (2011) menetapkan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2010 – 2030 dalam hal ini tentang rencana sistem pusat pelayanan atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang memiliki skala pelayanan satu satuan wilayah pembangunan (SWP). Meliputi kawasan perkotaan Kecamatan Brebes (SWP Utara), Kecamatan Ketanggungan (SWP Tengah) dan Kecamatan Bumiayu (SWP Selatan). Namun dari ketiga SWP itu, SWP Tengah merupakan daerah yang masih tertinggal hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pendapatan per kapita, aksesibilitas, dan kelengkapan fasilitas umum serta tidak berfungsinya PKL di Kecamatan Ketanggungan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi klasifikasi daerah Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes dengan metode Tipologi Klassen, mengetahui kekuatan interaksi keruangan antar Kecamatan di SWP Tengah dengan melihat pergerakan penduduk dalam pemanfaatan fasilitas umum, dan mengetahui kecamatan mana saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi SWP Tengah dengan metode skalogram.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat 3 kecamatan dari 6 kecamatan yang ada di SWP Tengah Kabupaten Brebes yang termasuk dalam daerah tertinggal yaitu Kecamatan Songgom, Banjarharjo, dan Larangan. Kemudian dari kekuatan interaksi keruangan Kecamatan Jatibarang dan Larangan mempunyai daya tarik bagi masyarakat di SWP Tengah dilihat dari masyarakat di kecamatan lain lebih memilih memanfaatkan fasilitas yang ada di kedua kecamatan tersebut. Sementara itu dari hasil analisis skalogram, kecamatan dengan jumlah dan jenis fasilitas yang lengkap terdapat di Kecamatan Jatibarang dan Larangan. Dengan demikian dari kekuatan interaksi, jumlah dan jenis fasilitas yang lengkap Kecamatan Jatibarang dan Larangan dapat dijadikan pusat pertumbuhan baru di SWP Tengah Kabupaten Brebes.

Kata Kunci: Pusat Pertumbuhan, Interaksi Spasial, Tipologi Klassen, Skalogram.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “**Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi Program Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu dan diberi dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Bapak Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro
4. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto MSP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto MSP selaku dosen wali yang telah membantu, memberikan nasehat dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

6. Bapak Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si dan Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, masukan, dan tambahan ilmu kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah mengajar dan membimbing penulis selama perkuliahan
8. Ayah (Tarmidi), Mamah (Sri Haryati), Kakak (Drajat Widyarto dan Lestari Widayasih), dan Adekku (Hidayati Pudjiastuti) yang selalu memberikan banyak bantuan, bimbingan, doa, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis
9. Bapak Drs. Ghazi, Bapak Kasir S.E. dan Mas Kiki Luqmanulhakim dari BAPPEDA yang telah membantu dalam wawancara dan mengumpulkan data selama penelitian di Kabupaten Brebes.
10. BAPPEDA dan BPS Kabupaten Brebes
11. Seluruh Camat dan para staf di 6 Kantor Kecamatan SWP Tengah Kabupaten Brebes, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan data, serta masukan selama penelitian di Kabupaten Brebes
12. Warga Kabupaten Brebes yang telah bersedia membantu dan bekerjasama dengan penulis selama penelitian
13. Tunjung Aji Dwiyanto dan Eko Setiawan dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam pembuatan peta-peta yang diperlukan dalam penyusunan skripsi

14. Teman-teman IESP 2010 yang telah memberi dukungan dan menemani penulis selama masa perkuliahan
15. Sahabat-sahabatku (Keluarga Besar SKF) Filia, Hana, Rista, Arum, Ofah, Nenden, Bunga, Tyas, Rafi, Yocky, Andri, Fahmi, Hafis, Nahar, Anggi, Abdurahman, Sitopu, Erwin, dan Hasani yang selalu setia menemani, memberi dukungan, serta bantuannya kepada penulis
16. Teman-teman (Fighter) Janwar, Eko, Tiko, Herlan, Nasuha, dan Alfian
17. Keluarga Tim 2 KKN UNDIP 2013, Sendangdawuhan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, dan
18. Seluruh pihak terkait yang secara tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan topik skripsi ini.

Semarang, 29 Januari 2015

Penulis

Rahmat Andi Yulianto
NIM. 12020110141011

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 22 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 23 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 25 |
| 2.1. Landasan Teori | 25 |
| 2.1.1. Konsep Daerah atau Wilayah | 25 |
| 2.1.2. Perencanaan Ekonomi | 25 |
| 2.1.3. Pembangunan Regional | 26 |
| 2.1.4. Pengertian dan Fungsi Kota..... | 29 |
| 2.1.5. Wilayah Pengaruh..... | 32 |
| 2.1.6. Interaksi Spasial..... | 33 |
| 2.1.7. Fasilitas yang Dibutuhkan dalam Suatu Kota Kecamatan dalam SWP..... | 34 |
| 2.1.8. Teori Lokasi..... | 35 |
| 2.1.9. Teori Keseimbangan dan Ketidakseimbangan dalam Pembangunan..... | 36 |
| 2.1.10. Pusat Pertumbuhan (<i>Growth Pole</i>)..... | 36 |
| 2.1.11. Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru | 39 |
| 2.2. Penelitian Terdahulu..... | 40 |

| | |
|---|-----|
| 2.3. Kerangka Pemikiran | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| 3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 49 |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data | 50 |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data | 51 |
| 3.4. Metode Analisis | 52 |
| 3.4.1. Analisis Typologi Klassen..... | 52 |
| 3.4.2. Interaksi Spasial secara Eksploratif..... | 53 |
| 3.4.3. Skalogram..... | 54 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS..... | 56 |
| 4.1. Dekripsi Objek Penelitian..... | 56 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Brebes | 56 |
| 4.1.2. Gambaran SWP Tengah Kabupaten Brebes | 57 |
| 4.1.2.1. Kondisi Perekonomian | 59 |
| 4.1.2.2. Kondisi Penduduk | 60 |
| 4.1.2.3. Tenaga Kerja | 62 |
| 4.2. Analisis Data..... | 63 |
| 4.2.1. Klasifikasi Daerah (Tipologi Klassen) | 63 |
| 4.2.2. Interaksi Wilayah di SWP Tengah | 65 |
| 4.2.2.1. Interaksi Kecamatan Banjarharjo | 65 |
| 4.2.2.2. Interaksi Kecamatan Ketanggungan | 70 |
| 4.2.2.3. Interaksi Kecamatan Larangan..... | 75 |
| 4.2.2.4. Interaksi Kecamatan Jatibarang | 80 |
| 4.2.2.5. Interaksi Kecamatan Songgom | 85 |
| 4.2.2.6. Interaksi Kecamatan Kersana..... | 90 |
| 4.2.3. Analisis Skalogram..... | 95 |
| 4.2.1. Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru | 100 |
| BAB V PENUTUP..... | 102 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 102 |
| 5.2. Keterbatasan | 103 |
| 5.3. Saran | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| LAMPIRAN | 110 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-----------|---|
| Tabel 1.1 | PDRB Kabupaten Brebes Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2013 (Jutaan rupiah) 4 |
| Tabel 1.2 | PDRB Lapangan Usaha Sektor Pertanian ADHK tahun 2000 Kab. Brebes Tahun 2013 8 |
| Tabel 1.3 | Produksi Bawang Merang Menurut SWP Kab. Brebes Tahun 2013 9 |
| Tabel 1.4 | Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut SWP Kab. Brebes Tahun 2009–2013 10 |
| Tabel 1.5 | PDRB ADHK Menurut SWP Kab. Brebes Tahun 2009–2013 (Jutaan rupiah) 11 |
| Tabel 1.6 | PDRB Per Kapita ADHK Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Brebes Tahun 2009 – 2013 (dalam rupiah) ... 12 |
| Tabel 1.7 | Hasil Analisis Klasifikasi Klassen tahun 2009 – 2013 Menurut SWP Kabupaten Brebes 14 |
| Tabel 1.8 | Tingkat Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Di SWP Tengah Kabupaten Brebes..... 149 |
| Tabel 1.9 | Tingkat Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Di SWP Tengah Kabupaten Brebes..... 20 |
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu 43 |
| Tabel 3.1 | Pengelompokan Pembangunan Klasifikasi Klassen 53 |
| Tabel 4.1 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2000 Menurut Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes Tahun 2009 dan 2013 (Jutaan Rupiah) 59 |
| Tabel 4.2 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHK 2000 Menurut Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes Tahun 2009-2013 (Rupiah) 60 |
| Tabel 4.3 | Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes 2013 (Jiwa) 61 |
| Tabel 4.4 | Klasifikasi Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes menurut <i>Klassen Typologi</i> Tahun 2009-2013 64 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Fasilitas Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes 2013 96 |
| Tabel 4.6 | Analisis Skalogram 98 |
| Tabel 4.7 | Jumlah Orde dan Range Serta Kecamatan – Kecamatan di SWP Tengah..... 99 |

Tabel 4.8 Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru di SWP Tengah
Kabupaten Brebes 100

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------|---|
| Gambar 1.1 | Peta Administrasi Kabupaten Brebes..... 3 |
| Gambar 1.3 | Kondisi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di SWP Tengah Kabupaten Brebes 16 |
| Gambar 1.4 | Tren Jumlah Angkutan dan Penumpang Terminal Ketanggungan Tahun 2014 17 |
| Gambar 1.4 | Pertumbuhan Rata – Rata Jumlah Transaksi Komoditas Bawang Merah di Sub Terminal Argopolitan Tahun 2010 – 2013 (Kwintal)18 |
| Gambar 2.1 | Kurva Kuznet 27 |
| Gambar 2.2 | Diagram Sistem Perkotaan..... 30 |
| Gambar 2.3 | Luas Jangkauan <i>Range dan Threshold</i> 33 |
| Gambar 2.4 | Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan 38 |
| Gambar 2.5 | Kerangka Pemikiran..... 48 |
| Gambar 4.1 | Peta Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes 58 |
| Gambar 4.2 | Jumlah Penduduk Kab. Brebes Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja Dirinci Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2013 (persen) 62 |
| Gambar 4.3 | Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Banjarharjo..... 67 |
| Gambar 4.4 | Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Banjarharjo 67 |
| Gambar 4.5 | Fasilitas Perekonomian di Kecamatan Banjarharjo 68 |
| Gambar 4.6 | Peta Interaksi Keruangan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 69 |
| Gambar 4.7 | Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Ketanggungan 71 |
| Gambar 4.8 | Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Ketanggungan 72 |
| Gambar 4.9 | Fasilitas Perekonomian di Kecamatan Ketanggungan 73 |
| Gambar 4.10 | Peta Interaksi Keruangan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes 74 |
| Gambar 4.11 | Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Larangan 76 |
| Gambar 4.12 | Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Larangan..... 77 |
| Gambar 4.13 | Fasilitas Perekonomian di Kecamatan Larangan 78 |
| Gambar 4.14 | Peta Interaksi Keruangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes 79 |
| Gambar 4.15 | Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Jatibarang..... 81 |
| Gambar 4.16 | Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Jatibarang 82 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Gambar 4.17 | Fasilitas Perekonomian di Kecamatan Jatibarang..... | 83 |
| Gambar 4.18 | Peta Interaksi Keruangan Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes | 84 |
| Gambar 4.19 | Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Songgom..... | 86 |
| Gambar 4.20 | Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Songgom | 87 |
| Gambar 4.21 | Fasilitas Perekonomian di Kecamatan Songgom..... | 88 |
| Gambar 4.22 | Peta Interaksi Keruangan Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes | 89 |
| Gambar 4.23 | Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Kersana | 91 |
| Gambar 4.24 | Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kersana..... | 92 |
| Gambar 4.25 | Fasilitas Perekonomian di Kecamatan Kersana | 93 |
| Gambar 4.26 | Peta Interaksi Keruangan Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes | 94 |
| Gambar 4.27 | Fasilitas di Kecamatan Jatibarang dan Larangan yang Tidak Ada di Kecamatan lain di SWP Tengah Kabupaten Brebes | 101 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| A DATA – DATA PENELITIAN | 110 |
| B GUIDE QUESTIONS WAWANCARA PENELITIAN TUJUAN II..... | 122 |
| C DOKUMENTASI PENELITIAN | 124 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapat kondisi yang lebih baik. Menurut Arsyard (2004) pembangunan daerah dapat diartikan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada untuk membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam merangsang perkembangan kegiatan ekonomi.

Menurut Risky (2014) pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi (*GDP Oriented*) seperti yang telah ditempuh beberapa dasawarsa lalu memperlihatkan keberhasilan secara memuaskan di berbagai bidang pembangunan, dengan diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang telah memperlihatkan peningkatan secara terus menerus. Namun, pertumbuhan yang tinggi itu telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan atau ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan antardaerah (yang maju dan tertinggal).

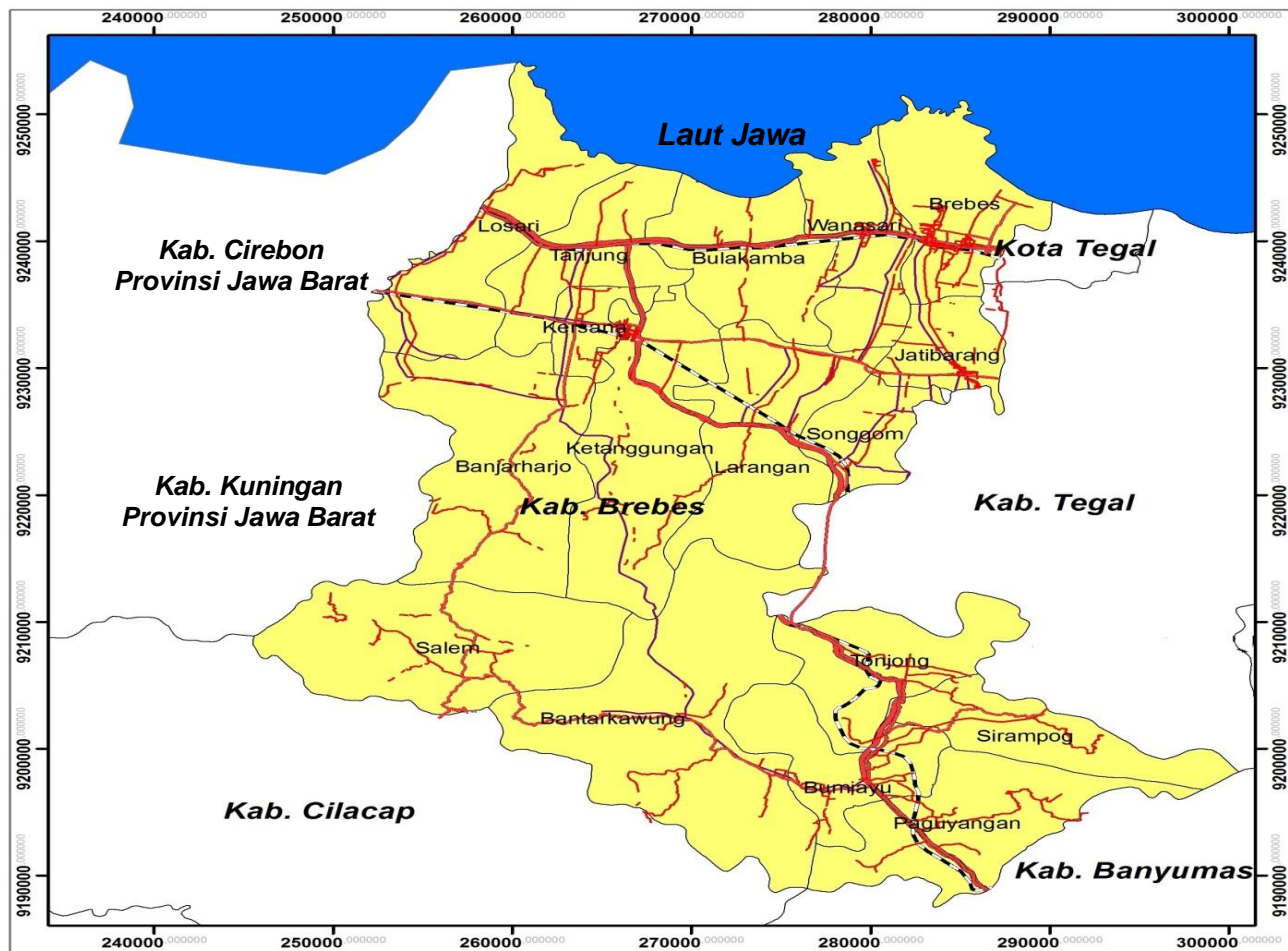
Pemerataan distribusi hasil dari pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah dengan menyelaraskan pembangunan sektoral dan wilayah merupakan salah satu upaya dalam mengatasi ketimpangan pembangunan. Menurut Rahardjo (2005:9) pendekatan sektoral mendekati pembangunan nasional melalui kegiatan usaha demi kegiatan usaha, yang dikelompokkan ke dalam sektor








dan subsektor. Pendekatan regional bertolak pada kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha terkait pada wilayah, selalu memanfaatkan, dan menempati ruang wilayah. Selain itu, dimensi lokal atau lokalitas harus diperhitungkan dalam pendekatan pembangunan.

Menurut Gultom (2013) penerapan konsep wilayah pembangunan merupakan sebuah media untuk merumuskan strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Konsep ini menetapkan wilayah tertentu sebagai pusat pembangunan dan wilayah lain sebagai satelitnya. Penerapan wilayah pembangunan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah yang berbeda-beda untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Menurut Tarigan (2007) Faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah Keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi, dan arus lalu lintas modal antarwilayah.

Salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keuntungan lokasi yang strategis adalah Kabupaten Brebes, terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat serta dilalui dua jalur transportasi utama di Pulau Jawa yaitu jalur utama wilayah selatan dan jalur Pantura (pantai utara), membuat Kabupaten Brebes menjadi pintu utama jalur perdagangan Provinsi Jawa Tengah wilayah barat. Secara administratif wilayah Kabupaten Brebes terbagi menjadi 17 Kecamatan dengan batas wilayah adalah Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa yang kaya dengan berbagai hasil laut, sebelah barat Kabupaten Cirebon dan Kuningan Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta sebelah timur Kabupaten Tegal dan Kota Tegal yang dapat digambarkan di bawah ini.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Brebes



| | |
|---|---|
|  PROGRAM STUDI SARJANA ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNDIP SEMARANG 2014 | |
| PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BREBES | |
| LEGENDA - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kabupaten  Jalan Propinsi  Jalan Kabupaten  Jalan Kereta Api  sungai | |
| ORIENTASI  | INSET  Provinsi Jawa Tengah, Kab. Brebes |
| SKALA 0 3.250 6.500 13.000 19.500 26.000 Meters | |
| SUMBER: -BAPPEDA KAB. BREBES TAHUN 2013 -HASIL ANALISIS TAHUN 2014 | |
| DIKERJAKAN OLEH: RAHMAT ANDI YULIANTO NIM: 12020110141011 | |

Kemudian jika dilihat dari pembangunan sektoralnya, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Brebes. Hal ini dilihat dari tabel 1.1 perkembangan perekonomian Kabupaten Brebes dari tahun 2009 dan 2013 sektor pertanian berkontribusi hingga 50% dari pembentukan PDRB Kabupaten Brebes, dengan pendapatan sektor pertanian pada tahun 2009 sebesar Rp 2,7 juta dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 3,1 juta. Sementara itu dari total PDRB Kabupaten Brebes tahun 2009 sebesar Rp 5,2 juta dan tahun 2013 Rp. 6,3 juta

Tabel 1.1
PDRB Kabupaten Brebes Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2013 (Jutaan rupiah)

| Lapangan Usaha | 2009 | Share | 2013 | Share |
|---|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Pertanian | 2.771.596,58 | 52,81% | 3.141.965,92 | 49,77% |
| Pertambangan dan Penggalian | 68.606,31 | 1,31% | 85.803,80 | 1,36% |
| Industri Pengolahan | 633.770,12 | 12,08% | 863.235,78 | 13,67% |
| Listrik, Gas dan Air bersih | 46.235,91 | 0,88% | 65.350,65 | 1,04% |
| Bangunan | 112.414,05 | 2,14% | 133.983,34 | 2,12% |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 1.065.334,10 | 20,30% | 1.381.169,29 | 21,88% |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 152.456,66 | 2,91% | 198.467,42 | 3,14% |
| Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 148.935,22 | 2,84% | 206.641,66 | 3,27% |
| Jasa - Jasa | 248.548,46 | 4,74% | 236.813,94 | 3,75% |
| Total PDRB | 5.247.897,41 | 100% | 6.390.184,06 | 100% |

Sumber: BPS Kab. Brebes, diolah

Perencanaan pembangunan daerah seharusnya memacu pembangunan untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat dengan peran aktif masyarakat dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah. Menurut Kuncoro (2004) salah satu tujuan kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar.

Hal tersebut sesuai dengan amanat tentang otonomi daerah yang tertuang dalam UUD No. 32 Pasal 14 Tahun 2004 yang berbunyi, “Urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

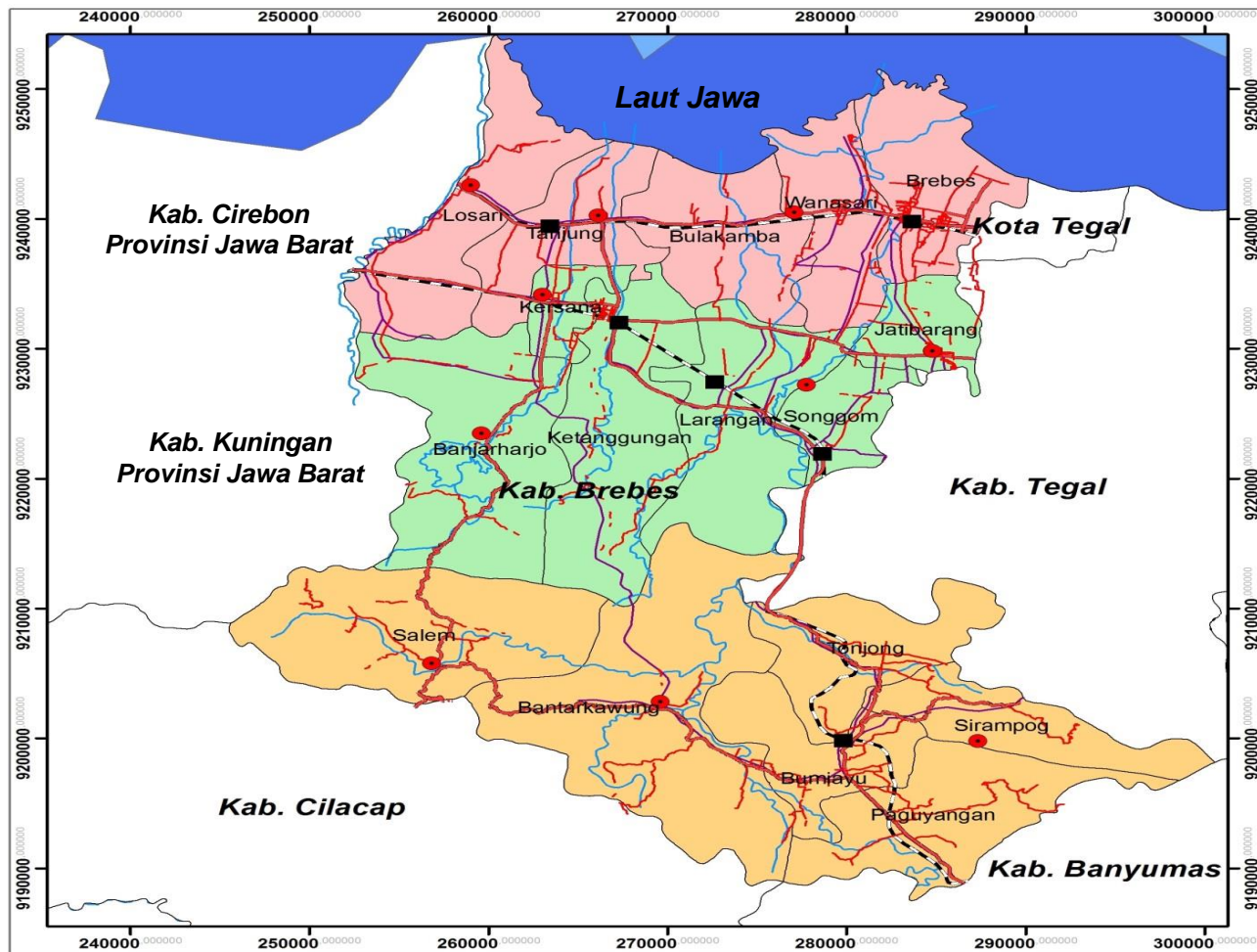
Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 pasal 12 (2011) menetapkan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2010 – 2030 dalam hal ini tentang rencana sistem pusat pelayanan atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi kawasan perkotaan Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Bumiayu. PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil – hasil bumi dari kecamatan – kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. Untuk mendukung fungsi tersebut maka fasilitas yang harus ada adalah fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa skala kecamatan dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai.














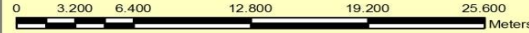
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) direncanakan memiliki skala pelayanan satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang terdiri dari gabungan beberapa kecamatan yang ada di dalamnya. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Brebes dibagi menjadi SWP Utara, SWP Tengah, dan SWP Selatan yang dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendorong wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan karakteristik kawasan, pengurangan ketimpangan perkembangan wilayah, dan pengembangan sistem struktur kegiatan. Maka penetapan SWP Kabupaten Brebes meliputi:

- Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Utara dengan pusat pengembangan di Perkotaan Brebes sebagai titik pertumbuhan Wilayah Pantai Utara (Pantura) terdiri dari Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Losari.
- Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah dengan pusat pengembangan di Perkotaan Ketanggungan sebagai titik pertumbuhan Wilayah Tengah yang terdiri dari Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, dan Kecamatan Banjarharjo.
- Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Selatan dengan pusat pengembangan di Perkotaan Bumiayu sebagai titik pertumbuhan Wilayah Selatan yang terdiri dari Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem.

Dari pembagian Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Brebes menurut Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 pasal 12 (2011) dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2
Peta Satuan Wilayah Pembangunan Kabupaten Brebes



| | |
|---|---|
|  PROGRAM STUDI SARJANA ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNDIP SEMARANG 2014 | |
| PETA SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN KABUPATEN BREBES | |
| LEGENDA - - - - - Batas Kecamatan - - - - - Batas Kabupaten  Jalan Propinsi  Jalan Kabupaten  Jalan Lokal  Jalan Kereta Api  sungai  Stasiun  Terminal  SWP I  SWP II  SWP III | |
| ORIENTASI | INSET |
|  N |  Provinsi Jawa Tengah, Kab. Brebes |
| SKALA  0 3.200 6.400 12.800 19.200 25.600 Meters | |
| SUMBER: -BAPPEDA KAB. BREBES TAHUN 2013 -HASIL ANALISIS TAHUN 2014 | |
| DIKERJAKAN OLEH: RAHMAT ANDI YULIANTO NIM: 12020110141011 | |

Sektor pertanian merupakan sektor berkontribusi paling besar di Kabupaten Brebes. Menurut laporan akhir rencana pengembangan sentra ekonomi Kabupaten Brebes (2013) hampir dari 1,7 juta penduduk Kabupaten Brebes 70 persennya bekerja di sektor pertanian. Dengan beberapa komoditas unggulan dari sektor pertanian adalah bawang merah dan telur asin.

Dari kedua komoditas tersebut, komoditas bawang merah merupakan komoditas utama di Kabupaten Brebes. Menurut laporan akhir pengembangan sentra ekonomi Kabupaten Brebes (2013) bawang merah bagi Kabupaten Brebes merupakan *trade mark* mengingat posisinya sebagai penghasil terbesar komoditas tersebut di tataran Nasional. Hal tersebut terlihat dari tabel 1.2 yaitu hampir 80% sumbangan dari PDRB sektor pertanian adalah dari tanaman bahan makanan yaitu bawang merah. Sedangkan komoditas telur asin pada lapangan usaha perternakan dan hasil – hasilnya hanya berkontribusi sebesar 9% dari PDRB sektor pertanian.

Tabel 1.2
PDRB Lapangan Usaha Sektor Pertanian ADHK tahun 2000 Kab. Brebes Tahun 2013

| No. | Lapangan Usaha | PDRB | Share |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| 1 | Tanaman Bahan Makanan | 2,458,024.55 | 78.23% |
| 2 | Tanaman Perkebunan | 48,587.38 | 1.55% |
| 3 | Peternakan dan Hasil - Hasilnya | 283,859.11 | 9.03% |
| 4 | Kehutanan | 177,916.57 | 5.66% |
| 5 | Perikanan | 173,578.31 | 5.52% |
| Sektor Pertanian | | 3,141,955.92 | 100% |

Sumber: BPS Kab. Brebes, diolah

Adapun beberapa pusat – pusat bawang merah di Kabupaten Brebes Menurut laporan akhir rencana pengembangan sentra ekonomi Kabupaten Brebes (2013) setidaknya dengan luas panen 20.000 – 25.000 hektar ini tersebar di 11

kecamatan, yaitu di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tonjong, Losari, Ketanggungan, Kersana, Larangan, Songgom, Jatibarang, dan sebagian Banjarharjo.

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah merupakan daerah yang memiliki pusat – pusat bawang merah paling banyak di Kabupaten Brebes, setidaknya ada 6 kecamatan dari 11 kecamatan yang menjadi pusat bawang merah di Kabupaten Brebes. Kemudian berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa rata – rata produksi bawang merah yang tinggi terdapat di SWP Tengah sebesar 797,00 kwintal/ha, SWP Utara sebesar 558,67 kwintal/ha dan SWP Selatan sebesar 120,00 kwintal/ha.

Tabel 1.3
Produksi Bawang Merah Menurut SWP Kab. Brebes Tahun 2013

| No. | SWP | Luas Panen (Ha) | Rata - Rata Produksi (Kwintal/Ha) |
|-----|---------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Utara | 15.506 | 558,67 |
| 2 | Tengah | 9.383 | 797,00 |
| 3 | Selatan | 21 | 120,00 |

Sumber: BPS Kab. Brebes, diolah

Namun, rata – rata produksi yang tinggi tersebut tidak ditunjang dengan fasilitas penunjang sektor pertanian yang ada di SWP Tengah. Berdasarkan hasil survei lapangan tanggal 5 Desember 2014 terdapat beberapa pasar induk bawang (Sentra Pasar Bawang) yang justru terdapat di Kecamatan Wanasari dan Brebes yang terletak di SWP Utara. Adapun pusat sentra pengepul/lumbung bawang merah (Sub Terminal Agropolitan) di Kecamatan Larangan dilihat dari kondisinya terlihat

sepi. Hal ini dikarenakan dari segi aksesibilitas lebih mudah ke pasar induk bawang (Sentra Pasar Bawang) yang ada di SWP Utara Kabupaten Brebes.

Hal tersebut menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi SWP Tengah mengalami penurunan. Jika dilihat dari tabel 1.4 pada tahun 2009 laju pertumbuhan SWP Tengah sebesar 5,08% menjadi 4.82% tahun 2013. Sementara itu sebaliknya laju pertumbuhan SWP Utara yang mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2009 sebesar 4,70% menjadi 5,88% tahun 2013. Mengingat bahwa salah satu keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Tarigan (2007) pertumbuhan ekonomi wilayah secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut SWP
Kab. Brebes Tahun 2009–2013

| No. | SWP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rata - Rata |
|------------|---------|------|------|------|------|------|-------------|
| 1 | Utara | 4.70 | 5.30 | 4.85 | 5.64 | 5.88 | 5.27 |
| 2 | Tengah | 5.08 | 4.80 | 5.05 | 5.12 | 4.82 | 4.98 |
| 3 | Selatan | 5.20 | 4.72 | 5.01 | 4.87 | 4.46 | 4.85 |
| Kab.Brebes | | 4.99 | 4.94 | 4.97 | 5.21 | 5.06 | 5.04 |

Sumber: BPS Kab. Brebes, diolah

Kemudian dari PDRB masing – masing Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dari tabel 1.5 selama 2009 – 2013, terlihat bahwa SWP selatan merupakan daerah dengan penyumbang PDRB terbesar terhadap peekonomian Kabupaten Brebes yaitu sebesar 2.281.154,78 juta pada tahun 2013. Kemudian SWP Utara

merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua sebesar 2.263.830,56 juta. Sedangkan SWP Tengah merupakan penyumbang PDRB terkecil sebesar 1.845.198,72 juta.

Tabel 1.5
PDRB ADHK Menurut SWP Kab. Brebes Tahun 2009–2013 (Jutaan rupiah)

| No. | SWP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Utara | 1,833,291.68 | 1,930,395.82 | 2,024,032.47 | 2,138,166.55 | 2,263,830.56 |
| 2 | Tengah | 1,521,013.92 | 1,594,074.80 | 1,674,608.20 | 1,760,430.71 | 1,845,198.72 |
| 3 | Selatan | 1,893,591.81 | 1,982,932.10 | 2,082,237.18 | 2,183,670.12 | 2,281,154.78 |
| Kab. Brebes | | 5,247,897.41 | 5,507,402.72 | 5,780,877.85 | 6,082,267.38 | 6,390,184.06 |

Sumber: BPS Kabupaten Brebes, diolah.

Perbedaan PRDB dan pertumbuhan PDRB seperti ini dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan antarwilayah, hal tersebut antara lain karena kegiatan perekonomian cenderung berorientasi di wilayah – wilayah tertentu seperti di SWP Utara dan SWP Selatan. Menurut Tambunan (2009) salah satu indikator yang dapat digunakan dalam melihat ketimpangan antarwilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan indikator tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Brebes, di mana perekonomian Kabupaten Brebes bertumpu pada beberapa SWP Utara dan Selatan. Hal ini dikarenakan pada SWP Utara dan Selatan memiliki kontribusi terhadap PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan SWP Tengah.

Todaro (2006) juga menyebutkan, salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah yaitu dengan menggunakan PDRB per kapita. PDRB per kapita yang semakin besar menggambarkan tingkat

kesejahteraan masyarakat semakin baik. Selain dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan tersebut, perlu dicermati apakah PDRB per kapita tersebut sudah terdistribusi secara merata atau tidak.

Dari tabel 1.6 PDRB per kapita masing – masing SWP dari tahun 2009 – 2013 terlihat bahwa SWP Tengah merupakan wilayah dengan PDRB per kapita paling rendah dengan rata – rata PDRB per kapita sebesar 2.741.875 rupiah di bawah rata – rata PDRB per kapita Kabupaten Brebes sebesar 3.318.962 rupiah. Sementara itu SWP Utara dan Selatan rata – rata PDRB per kapita paling tinggi di Kabupaten Brebes. Perbedaan tinggi rendahnya PDRB per kapita antarwilayah dapat mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Brebes.

Tabel 1.6
PDRB Per Kapita ADHK Menurut Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di
Kabupaten Brebes Tahun 2009 – 2013 (dalam rupiah)

| No. | SWP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Rata - Rata |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | Utara | 2.786.400 | 2.941.821 | 3.099.411 | 3.263.726 | 3.418.654 | 3.102.002 |
| 2 | Tengah | 2.486.176 | 2.608.061 | 2.743.818 | 2.874.880 | 2.996.441 | 2.741.875 |
| 3 | Selatan | 3.932.241 | 4.138.683 | 4.364.138 | 4.551.119 | 4.712.056 | 4.339.647 |
| Kab. Brebes | | 2.999.445 | 3.157.498 | 3.323.442 | 3.484.512 | 3.629.916 | 3.318.962 |

Sumber: BPS Kab. Brebes, diolah

Ketimpangan pembangunan yang terjadi antarwilayah di suatu daerah merupakan hal yang wajar terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah (Sitorus, 2012). Menurut Sjafrizal (2012) hipotesis Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung

meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antarwilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Adapun beberapa dampak positif dan negatif akibat dari ketimpangan menurut Sitorus (2012) dampak positif dari ketimpangan adalah memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan menurut Todaro (2006) dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil.

Ketimpangan antar daerah dapat menyebabkan ketidakadilan antar daerah di mana ada daerah yang maju dan ada daerah yang relatif tertinggal, untuk melihat klasifikasi daerah/wilayah itu termasuk daerah tertinggal atau tidak menurut Kuncoro (2004) yaitu dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen dengan dua indikator yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita wilayah, dengan klasifikasi daerah menurut Menurut Sjafrizal (1997) sebagai berikut:

- a. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding daerah di atasnya.
- b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding di atasnya.
- c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding di atasnya.
- d. Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding di atasnya.

Tabel 1.7
Hasil Analisis Klasifikasi Klassen tahun 2009 – 2013 Menurut SWP
Kabupaten Brebes

| No. | SWP | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----|---------|------|------|------|------|------|
| 1 | Utara | IV | III | IV | III | III |
| 2 | Tengah | III | IV | III | IV | IV |
| 3 | Selatan | I | II | I | II | II |

Sumber: BPS Kab. Brebes, diolah

Jika dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2009 SWP Utara merupakan daerah yang tertinggal, namun pada tahun 2013 menjadi daerah berkembang. SWP selatan dalam kategori daerah maju pada tahun 2009 tetapi pada tahun 2013 menjadi daerah maju tapi tertekan. Berbanding terbalik di SWP Tengah pada tahun 2009 merupakan daerah yang berkembang tetapi pada tahun 2013 menjadi daerah yang terbelakang.

Adapun ketimpangan antar daerah yang menyebabkan adanya daerah yang maju dan daerah yang tertinggal ini, menurut Tambunan (2001) salah satu penyebab terjadinya ketertinggalan suatu daerah yaitu adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, di mana ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi cenderung tumbuh pesat. Myrdal (1957) juga menjelaskan bahwa pembangunan di daerah – daerah yang lebih maju atau pembangunan yang terpusat justru menyebabkan hambatan yang lebih besar dari daerah – daerah yang terbelakang untuk maju dan berkembang. Keadaan ini yang disebut sebagai *backwash effect*. Melebarnya kesenjangan antardaerah dipengaruhi oleh *backwash effect* dan *spread effect* kemajuan kota terhadap daerah sekitarnya (*hinterland*). Dalam persaingan sempurna apabila *backwash effect* mendominasi *spread effect* maka kesenjangan antardaerah semakin divergen atau sebaliknya konvergen. Adapun indikator yang menyebabkan *backwash effect* adalah corak perpindahan penduduk yang masih muda dan terdidik, corak aliran modal yang kurang di daerah miskin karena modal lebih terjamin di daerah maju, dan jaringan transportasi daerah maju lebih baik.

Konsentrasi kegiatan perekonomian atau pusat pertumbuhan suatu daerah dalam hal ini adalah PKL harus bisa memberikan *spread effect* terhadap daerah sekitarnya (*hinterland*) sebaliknya jika PKL itu memberikan *backwash effect* terhadap daerah sekitarnya justru akan mengakibatkan kesenjangan antardaerah di mana ada daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Dalam hasil analisis Tipologi Klassen SWP Tengah merupakan daerah yang relatif tertinggal dibandingkan SWP Utara dan Selatan Kabupaten Brebes. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di SWP Tengah adalah di Kecamatan Ketanggungan, untuk melihat seberapa

jauh berfungsinya PKL Kecamatan Ketanggungan di SWP Tengah terhadap daerah sekitarnya, bisa dilihat dari kondisi beberapa aktivitas perkotaan, kawasan industri, pasar, dan kawasan wisata yang menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah sekitar seperti rumah makan, persewaan pertokoan, dan lainnya. Berikut kondisi PKL Ketanggungan di SWP Tengah Kabupaten Brebes.

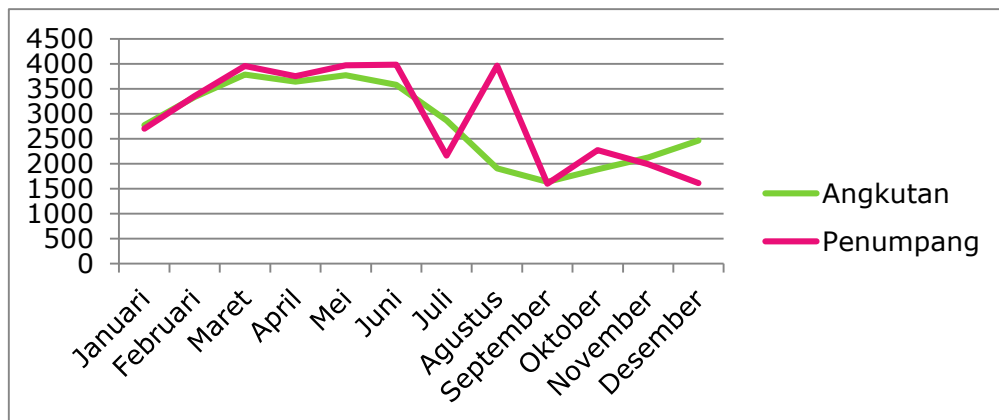
Gambar 1.3
Kondisi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di SWP Tengah Kabupaten Brebes



Sumber : Survei lapangan, 2 – 5 Desember 2014. Gambar kiri atas adalah sub terminal argopolitan sebagai pusat pengepulan bawang merah dan kanan atas pusat pasar tradisional di Kecamatan Ketanggungan. Gambar kiri tengah merupakan terminal dalam kota dan luar kota Kabupaten Brebes terletak di jalan utama transportasi selatan Pulau Jawa yang terlihat sepi dan kanan tengah adalah beberapa ton bawang merah yang akan dijual di pasar bawang yang terletak di SWP Utara. Gambar kanan dan kiri bawah merupakan akses jalan utama Kecamatan Banjarharjo, Kersana, Jatibarang dan Larangan menuju pusat pertumbuhan di Kecamatan Ketanggungan.

Jika dilihat dari PKL di Kecamatan Ketanggungan yang menjadi pusat perekonomian SWP Tengah walaupun dilalui jalur utama Pulau Jawa wilayah selatan kondisinya masih kurang hidup. Seperti fasilitas yang ada yaitu Terminal Ketanggungan jika dilihat dari kondisinya terlihat sepi dan tidak berfungsi, hal ini ditunjukkan oleh data jumlah penumpang dan angkutan yang relatif menurun pada gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.4
Pertumbuhan Jumlah Angkutan dan Penumpang Terminal Ketanggungan
Tahun 2014



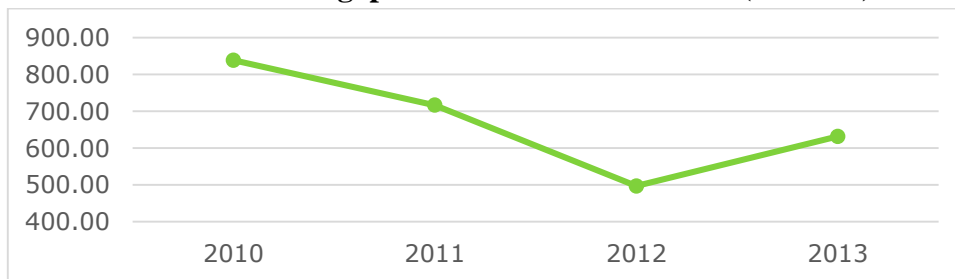
Sumber : Dishub Kabupaten Brebes

Gambar di atas menunjukkan pertumbuhan dari jumlah penumpang dan angkutan di Terminal Ketanggungan dari Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014 yang relatif menurun, dari jumlah angkutan yang masuk terlihat terjadi penurunan dari 3500 angkutan pada Bulan Juni menjadi 1500 angkutan pada Bulan September, walaupun pada Bulan Oktober hingga Desember mengalami kenaikan namun kenaikannya relatif kecil yaitu hanya sebesar 2500 angkutan. Dari jumlah penumpang di Terminal Ketanggungan dari Bulan Juni hingga Desember juga relatif menurun, hanya pada Bulan Agustus terjadi kenaikan sebesar 4000

penumpang yang dikarenakan hari Raya Idul Fitri jatuh pada Bulan Agustus di mana terjadi arus mudik yang tinggi sehingga tingkat jumlah penumpang meningkat di Terminal Ketanggungan.

Kemudian dari fasilitas pendukung sektor pertanian di mana komoditas bawang merah merupakan komoditas unggulan di SWP Tengah, terdapat Sub Terminal Argopolitan yang berfungsi untuk pusat pengepul komoditas bawang merah di SWP Tengah. Namun, dilihat dari kondisinya kurang berfungsi hal ini terlihat dari data jumlah transaksi yang relatif menurun dari tahun 2010 – 2013.

Gambar 1.5
Pertumbuhan Rata – Rata Jumlah Transaksi Komoditas Bawang Merah di Sub Terminal Argopolitan Tahun 2010 – 2013 (Kwintal)



Sumber: Sub Terminal Argopolitan

Jika dilihat dari gambar di atas terjadi penurunan rata – rata transaksi dari tahun 2010 sebesar 800 kwintal turun hingga tahun 2012 sebesar 500 kwintal, walaupun pada 2013 sempat naik sebesar 650 kwintal namun kenaikannya relatif masih kecil dibandingkan dengan penurunannya.

Kemudian dari tingkat kebutuhan fasilitas kesehatan yang ada di SWP Tengah Kabupaten Brebes menurut standar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yaitu dari tingkat standar kebutuhan Fasilitas Kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin, Klinik Pengobatan, dan Dokter Praktek dengan masing – masing standar kebutuhan sebagai berikut.

Tabel 1.8
Tingkat Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Di SWP Tengah Kabupaten Brebes

| No. | Fasilitas Kesehatan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Standar Kebutuhan (jiwa/unit) | Tingkat Kebutuhan (unit) | Kondisi Eksisting (unit) |
|-----|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Rumah Sakit | 608988 | 240000 | 3 | 2 |
| 2 | Rumah Bersalin | 608988 | 30000 | 20 | 13 |
| 3 | Puskesmas/P. Pembantu | 608988 | 150000 | 4 | 28 |
| 4 | Klinik Pengobatan | 608988 | 3000 | 203 | 33 |
| 5 | Dokter Praktek | 608988 | 5000 | 122 | 31 |

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Dari semua jumlah fasilitas kesehatan yang ada di SWP Tengah Kabupaten Brebes hanya jenis Fasilitas Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang sudah mencukupi standar kebutuhan dan bahkan melebihi standar kebutuhan dari DPU. Hal ini membuat beberapa masyarakat lebih memilih berinteraksi keluar dari SWP Tengah dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang lain. Adapun fasilitas Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang sudah mencukupi dan bahkan melebihi standar kebutuhan dari DPU seharusnya dapat di manfaatkan dan dioptimalkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat namun dari jumlah puskesmas yang ada masih kurang dioptimalkan di mana menurut hasil laporan rekapitulasi puskesmas Kab. Brebes tahun 2013 dari 28 unit puskesmas yang ada setidaknya hanya 7 puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap.

Sementara itu dari tingkat kebutuhan fasilitas pendidikan yang ada di SWP Tengah Kabupaten Brebes menurut standar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yaitu dari tingkat standar kebutuhan fasilitas pendidikan seperti TK, SD/MI, SMP/Mts, SMU/SMA, dan Perguruan Tinggi sebagai berikut.

Tabel 1.9
Tingkat Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Di SWP Tengah Kabupaten Brebes

| No. | Fasilitas Pendidikan | Jumlah Penduduk (jiwa) | Standar Kebutuhan (jiwa/unit) | Tingkat Kebutuhan (unit) | Kondisi Eksisting (unit) |
|-----|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | TK | 608988 | 1000 | 609 | 122 |
| 2 | SD/MI | 608988 | 6000 | 101 | 291 |
| 3 | SMP/Mts | 608988 | 25000 | 24 | 54 |
| 4 | SMU/MA | 608988 | 30000 | 20 | 15 |
| 5 | Perguruan Tinggi | 608988 | 70000 | 9 | 1 |

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Dari semua jumlah jenis fasilitas pendidikan yang ada di SWP Tengah Kabupaten Brebes hanya jenis fasilitas pendidikan SD/MI dan SMP/Mts yang sudah mencukupi standar kebutuhan dan bahkan melebihi standar kebutuhan dari DPU. Hal ini membuat beberapa masyarakat lebih memilih berinteraksi keluar dari SWP Tengah dalam menggunakan fasilitas pendidikan yang lain.

Dari penjelasan di atas bahwa PKL Kecamatan Ketanggungan di SWP Tengah kurang memberikan *spread effect* terhadap daerah sekitarnya. Salah satu fasilitas yang tidak berfungsi seperti fasilitas Terminal Ketanggungan yang terlihat sepi dan mati di mana hal ini didukung oleh data jumlah penumpang dan angkutan yang relatif menurun pada Bulan Januari hingga Desember Tahun 2014. Kemudian dari fasilitas perekonomian terutama bagi sektor pertanian dengan komoditas bawang merah sebagai komoditas unggulan di SWP Tengah seperti fasilitas sub terminal argopolitan terlihat sepi dan mati hal ini didukung dari data transaksi komoditas bawang merah di sub terminal argopolitan relatif menurun dari tahun 2010 – 2013 yang dikarenakan beberapa kecamatan – kecamatan yang ada di SWP Tengah sebagian mendistribusikan hasil pertanian (bawang merah) ke luar dari

SWP Tengah. Sementara itu interaksi ekonomi yang terjadi dari masyarakat setempat cenderung berinteraksi ke luar dari SWP Tengah. Menurut Kiki Luqmanulhakim Staf Subbagian Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah BAPPEDA Kab. Brebes pada wawancara tanggal 3 - 5 Desember 2014 dijelaskan bahwa interaksi ekonomi yang terjadi dari beberapa kecamatan yang tergabung dalam SWP Tengah cenderung ke luar, seperti ke Kab. Tegal, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, SWP Utara dan Selatan, hal ini karena fasilitas pelayanan lebih lengkap, aksesibilitas lebih mudah dan kesamaan budaya terutama daerah yang berbatasan dengan Kab. Kuningan dan Cirebon.

Seharusnya PKL di SWP Tengah dapat memberikan fasilitas dan sarana prasarana pendukung bagi daerah di belakangnya (*hinterland*) mengingat menurut Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Brebes 2010 – 2030 tentang PKL direncanakan memiliki skala pelayanan satu SWP dan berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya serta mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Namun, dalam penjelasan di atas menggambarkan bahwa PKL di SWP Tengah kurang berfungsi sehingga membuat SWP Tengah menjadi daerah yang relatif tertinggal, untuk itu perlu adanya pusat pertumbuhan baru dengan fasilitas dan sarana prasarana yang lebih lengkap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi SWP Tengah Kabupaten Brebes. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PENETAPAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) TENGAH KABUPATEN BREBES”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 pasal 12 (2011) menetapkan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2010 – 2030 dalam hal ini tentang rencana sistem pusat pelayanan atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan - kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya serta mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) direncanakan memiliki skala pelayanan satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang dibagi menjadi Satuan SWP Utara, Tengah, dan Selatan dilakukan atas dasar pertimbangan untuk mendorong wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan karakteristik kawasan, pengurangan ketimpangan perkembangan wilayah dan pengembangan sistem struktur kegiatan.

Namun, pada kenyataannya masih terjadi ketimpangan wilayah antar SWP di Kabupaten Brebes dengan masih terdapat daerah yang relatif tertinggal yaitu di SWP Tengah, kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut masih tertinggal dibanding wilayah yang lain. Tidak berfungsinya PKL Kecamatan Ketanggungan yang kurang memberikan *spread effect* terhadap daerah sekitarnya (*hinterland*) di SWP Tengah menjadi salah satu penyebab ketertinggalan SWP Tengah, hal ini diperlihatkan seperti fasilitas Terminal Ketanggungan yang terlihat dari kondisinya sepi dan mati di mana hal ini didukung oleh jumlah penumpang dan angkutan yang relatif menurun pada Bulan Januari hingga

Desember Tahun 2014. Kemudian dari fasilitas perekonomian terutama bagi komoditas unggulan (bawang merah) di SWP Tengah seperti fasilitas sub terminal argopolitan terlihat sepi dan mati hal ini didukung dari data transaksi komoditas bawang merah di sub terminal argopolitan relatif menurun dari tahun 2010 – 2013. Ketidaksihesuaian antara kebijakan pengembangan wilayah dengan fakta yang terjadi di lapangan menjadikan hal ini perlu dianalisis dengan menetapkan pusat – pusat pertumbuhan baru di SWP Tengah Kabupaten Brebes yang dapat mendorong wilayah dibelakangnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penentuan pusat pertumbuhan baru muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi masing – masing Kecamatan di SWP Tengah Kab. Brebes dilihat dari klasifikasi daerahnya?
2. Bagaimana interaksi yang terjadi antar Kecamatan di SWP Tengah?
3. Kecamatan manakah yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan baru di SWP Tengah Kab. Brebes?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi klasifikasi daerah Kecamatan di SWP Tengah Kab. Brebes.
2. Menganalisis kekuatan interaksi keruangan antar Kecamatan di SWP Tengah
3. Menganalisis kecamatan mana saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi SWP Tengah.

Sedangkan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah Kabupaten Brebes serta pihak terkait dalam bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengembangan dan perencanaan daerah yang berkelanjutan untuk penetapan pusat pertumbuhan baru SWP Tengah Kabupaten Brebes.
2. Sebagai referensi bagi penulis lainnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pengembangan dan penetapan pusat pertumbuhan baru.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab diantaranya: Bab I yaitu pendahuluan yang memaparkan tentang penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka yang memaparkan tentang penjelasan - penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang diambil sebagai landasan dalam penelitian ini, berbagai penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III yaitu metode penelitian menerangkan definisi operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan permasalahan yang ada di bab pendahuluan. Pada Bab IV ini mencakup gambaran umum objek penelitian, yaitu kondisi wilayah kecamatan – kecamatan di SWP Tengah yang diuraikan dalam hasil analisis data. baik melalui studi pustaka ataupun melalui penelitian lapangan. Pembahasan hasil penelitian ini merupakan pembahasan.

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Daerah atau Wilayah

Daerah atau wilayah mempunyai beberapa pengertian yang berbeda tergantung dari aspek tinjauannya. Menurut Arsyad (2004) dijelaskan bahwa pengertian daerah dari aspek ekonomi daerah mempunyai beberapa pengertian yaitu:

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat – sifat yang sama seperti dari segi pendapatan per kapita, sosial budaya, dan geografis dalam pengertian ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi dalam pengertian ini disebut sebagai daerah nodal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, dan kecamatan dalam pengertian ini disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

2.1.2. Perencanaan Ekonomi

Suatu pembangunan ekonomi dalam sebuah wilayah haruslah terencana secara bertahap untuk mencapai target atau tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

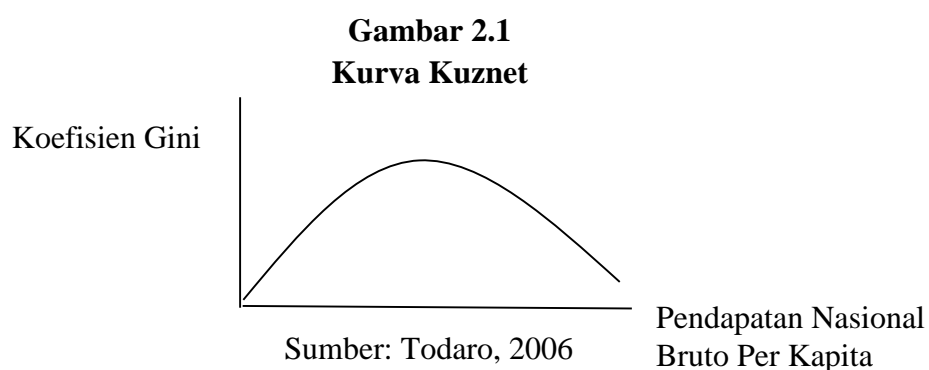
Arsyad (2004) menerangkan bahwa proses pembangunan ekonomi dibagi menjadi 4 tahap mulai dari saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Tahap kedua mengukur ketersediaan sumberdaya – sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut, tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, keterbatasan administrasi dan organisasi yang merupakan kendala (*constraints*) dari kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada tahapan ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditunjukkan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan wilayah. Pada tahap ini ditetapkan proyek – proyek investasi seperti pembangunan jalan raya, jaringan irigrasi, pabrik – pabrik, pusat – pusat kesehatan, pelayanan umum dan kebijakan – kebijakan seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi sebagai pendukung sektor – sektor ekonomi yang semuanya dapat merangsang perusahaan – perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kemudian pada tahapan keempat akhirnya perencanaan mengerjakan proses kegiatan – kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tanpa terganggu oleh kendala sumberdaya dan organisasional.

2.1.3. Pembangunan Regional

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya – sumberdaya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan – kebijakan daerah yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik local (daerah). Orientasi ini mengarah kepada pengambilan inisiatif – inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2004).

Kuznets (dalam Todaro, 2006) mengatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan akan meningkat pada awal pembangunan terjadi *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, tetapi pada tahap selanjutnya ketidakmerataan akan menurun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pola ini disebabkan karena pertumbuhan pada awal pembangunan cenderung terpusat pada sektor modern perekonomian yang pada saat itu kecil dalam penyerapan tenaga kerja. ketimpangan membesar karena kesenjangan antar sektor modern dan tradisional di mana perkembangan sektor modern lebih cepat daripada sektor tradisional. Observasi inilah di kenal sebagai kurva Kuznet yang menggambarkan ketimpangan pendapatan.



Menurut Dodi (2002) Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Sugeng (1999) mengungkapkan, pada sisi sosial ekonomis pengembangan wilayah adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, sarana dan prasarana pelayanan, dan sebagainya. Di sisi lain, secara ekologis pengembangan wilayah bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan akibat campur tangan manusia terhadap lingkungan. Sehingga pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pengembangan Wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan masing-masing wilayah.

Menurut Dodi (2002) konsep pengembangan wilayah berbeda dengan pembangunan sektoral. Pengembangan wilayah sangat berorientasi pada permasalahan pokok wilayah secara saling terkait, sedangkan pembangunan sektoral bertujuan mengembangkan sektor tertentu, tanpa memperhatikan kaitan dengan dengan sektor-sektor lainnya. Kedua konsep tersebut harus saling melengkapi, dalam arti bahwa pengembangan wilayah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan sektoral. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa berorientasi pada pengembangan wilayah akan berujung pada tidak optimalnya pembangunan sektor itu sendiri. Sehingga, pengembangan wilayah seharusnya

menjadi acuan bagi pembangunan sektoral, bukan merupakan agregat dari pembangunan sektor-sektor pada suatu wilayah.

Pengembangan wilayah diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi perkembangan antarwilayah, guna menjembatani kesenjangan antar desa-kota, pusat pertumbuhan dan belakangnya, serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya wilayah (Rusmansyah, 2006)

Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pendapatan ekonomi daerah menurut Tarigan (2007) adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi dalam suatu daerah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi dengan perhitungan pendapatan riil yang artinya dinyatakan dalam harga konstan dalam hal ini adalah PDRB dan laju pertumbuhan atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu di mana tingkat pendapatan tidak dipengaruhi faktor harga (inflasi). Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di wilayah tersebut meningkat.

2.1.4. Pengertian dan Fungsi Kota

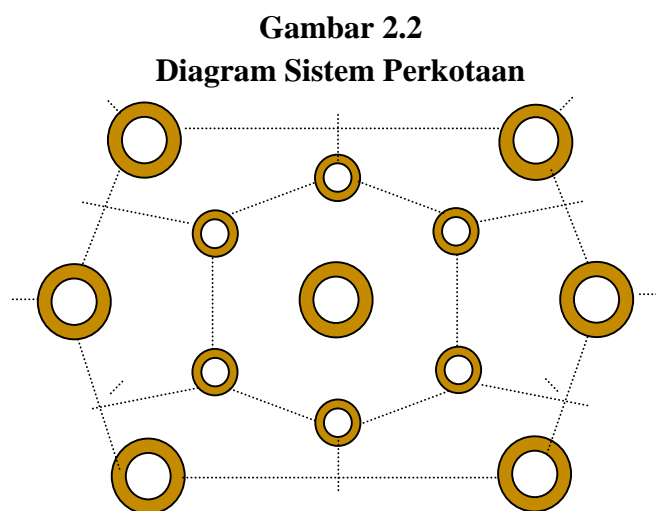
Menurut Tarigan (2007) Dalam perencanaan wilayah, sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat permukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda dengan daerah pedesaan/pedalaman.

Menurut Inmendagri No. 34 (dalam Risky, 2014) Suatu konsentrasi permukiman dapat di katakana sebagai kota apabila sudah memenuhi ciri tertentu,

(a) jumlah penduduk yang relatif besar daripada wilayah sekitarnya, (b) mempunyai kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibanding wilayah sekitarnya, (c) mempunyai proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya, (d) merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan pertanian wilayah sekitarnya dan tempat pemrosesan serta pemasaran bahan baku bagi industri.

Menurut Bratakusumah (dikutip dari Dita, 2007) fungsi kota adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (customer). Fungsi kota adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana serta pergantian moda transportasi.

1. Dalam pengembangan wilayah, fungsi kota terbagi menjadi:
 - a. Kota sebagai bagian dari sistem perwilayahan.
 - b. Kota membentuk sistem perkotaan di dalam wilayah, dengan menempatkan fungsi kota sesuai dengan potensi/kapasitas pengembangannya, misalnya dengan membentuk hirarki kota.



Sumber: Tarigan, 2007

Keterangan gambar: Lingkaran besar di tengah (1 buah) merupakan kota pertama, yang berhirarki paling tinggi. Kemudian lingkaran sedang di luar (6 buah) adalah kota berhirarki dibawah kota pertama. Lingkaran kecil diantara lingkaran paling besar dan sedang merupakan kota yang mendapat pengaruh dari kota pertama dan kedua.

- c. Kota membentuk jaringan pelayanan sosial ekonomi di dalam wilayah, dengan menempatkan fungsi kota sebagai pusat pengembangan dan pelayanan penduduk.
2. Kota berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah.
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan nasional. Contoh: Jakarta, Surabaya, Manado, Medan.
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan skala wilayah propinsi dan atau kabupaten seperti ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dll. Contoh: Kecamatan Brebes.
 - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) karena memiliki ruang lingkup pelayanan Dan pengembangan skala lokal seperti ibukota kecamatan, dll. Contoh: Kecamatan Brebes, Ketanggungan, dan Bumiayu
 3. Jenis fungsi pelayanan kota
 - a. Pelayanan Pengumpul Hasil Pertanian yaitu sebagai pengumpul hasil produk pertanian dari wilayah pengembangannya.
 - b. Kawasan Konsumen yaitu sebagai lokasi konsumen bagi hasil produk pertanian dan industri.
 - c. Pelayanan Sosial yaitu sebagai penyedia pelayanan sosial, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dll.

- d. Pelayanan Ekonomi yaitu sebagai penyedia pelayanan ekonomi, seperti pertokoan, penyedia konsumen, dll.
- e. Penyedia Lapangan Pekerjaan yaitu sebagai penyedia berbagai lapangan pekerjaan yang heterogen.

Dalam teori tempat pusat dinyatakan bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan, penyuplai barang - barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintahan (Richardson, 2001).

Menurut Tarigan (2007) hirarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya kota (jumlah penduduk) yang sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh.

2.1.5. Wilayah Pengaruh

Analisis wilayah pengaruh digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sebuah daerah terhadap daerah dibelakangnya (*hinterland*). Pengaruh yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaruh keruangan. Yaitu pengaruh pusat kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan berorde tinggi terhadap daerah – daerah pengaruhnya.

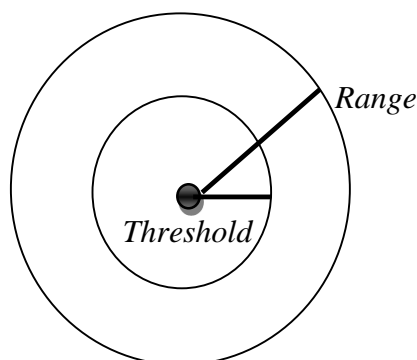
Sebuah wilayah apabila dalam memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi serta dalam menjual hasil produksinya cenderung bergantung pada pusat pertumbuhan/kota tersebut dikatakan sebagai wilayah pengaruh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Daerah ini

seperti daerah pedalaman, wilayah belakang (*hinterland*), dan daerah pertanian atau daerah perdesaan (Tarigan, 2007).

Jarak tempuh dari pusat pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya akan menjadi pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk di wilayah pengaruhnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Richardson (2001) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Kemudian menurut Tarigan (2007) jangkauan wilayah pemasaran/pengaruh mempunyai batasan yang dinamakan *range* dan batas minimal pengaruh disebut *threshold*. Tidak boleh ada produsen untuk komoditas yang sama dalam ruang *threshold* tersebut. Apabila ada salah satu akan gulung tikar atau kedua - duanya akan gulung tikar. Hubungan *range* dan *threshold* digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.3
Luas Jangkauan *Range* dan *Threshold*



Sumber: Tarigan, 2007

2.1.6. Interaksi Spasial

Interaksi spasial adalah hubungan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, interaksi yang dimaksud seperti interaksi perdagangan dengan motif ekonomi. Adapun beberapa interaksi menurut Rondinelli (dalam Andry, 2011) terdiri dari:

1. Keterkaitan fisik, berbentuk integrasi manusia melalui jaringan transportasi baik alami, maupun rekayasa.
2. Keterkaitan ekonomi, berkaitan erat dengan pemasaran sehingga terjadi aliran komoditas berbagai jenis bahan dan barang manufaktur serta modal dan keterkaitan produksi ke depan (*forward linkages*) maupun ke belakang (*backward linkages*) diantara berbagai kegiatan ekonomi.
3. Keterkaitan penduduk, terjadi dari pola migrasi baik permanen maupun kontemporer.
4. Keterkaitan teknologi, terutama peralatan yaitu cara dan metode produksi harus integrasi secara spasial dan fungsional.
5. Keterkaitan sosial yang merupakan dampak dari keterkaitan ekonomi terhadap pola hubungan sosial penduduk.
6. Keterkaitan pelayanan sosial seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, dan sebagainya.
7. Keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan misalnya pada struktur perbatasan administrasi maupun sistem anggaran dan biaya pembangunan.

2.1.7. Fasilitas yang Dibutuhkan dalam Suatu Kota Kecamatan dalam SWP

Fasilitas kota harus mampu sebagai wadah aktivitas baik ekonomi maupun sosial sehari-hari bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Rondinelli dan Kenneth (dalam Riski, 2014) fasilitas pelayanan seharusnya berlokasi di pusat pasar sebuah kota kecil, diantaranya terdiri dari: pasar permanen, kantor pemerintahan, bank, klinik dan rumah sakit kecil, sekolah menengah, jalan arteri, listrik, pipa air, persampahan, transportasi, terminal, lumbung/gudang,

fasilitas pemrosesan makanan, telepon, kantor polisi, kantor pos, pemadam kebakaran, dan pelayanan keamanan.

Sedangkan menurut United Nations (dalam Risky, 2014) fasilitas yang harus tersedia diantaranya adalah fasilitas: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olah raga, keagamaan, rekreasi, kebudayaan, administrasi, keamanan, komersial, keuangan, pertanian, peternakan, industri, transportasi, pos dan telekomunikasi, perumahan persampahan, drainase, listrik, serta jalan. Fasilitas harus merinci ruang lingkup pelayanan, jumlah dan kualitas fasilitas untuk masing-masing kelompok umur, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya. Pendekatannya dilakukan atas satuan penduduk yang dapat mendukung adanya fasilitas tersebut.

2.1.8. Teori Lokasi

Menurut Tarigan (2007) Teori Lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber – sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, pertambangan, sekolah, tempat ibadah dan rumah sakit tidaklah asal saja/acak berada di lokasi tersebut. Melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dimengerti.

Losch (dalam Tarigan, 2007) mengatakan bahwa lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang

menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Atas dasar pandangan di atas Losch cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar.

2.1.9. Teori Keseimbangan dan Ketidakseimbangan dalam Pembangunan

Secara geografis pertumbuhan tidak seimbang diterapkan mengkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada satu atau beberapa pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan (growth point) itu akan memberikan dampak penitisan (trickling down effect). Menurut LPEM (dalam Sasya, 2011) teori pertumbuhan tidak seimbang dikemukakan oleh Hirschman, Myrdall dan Perroux sebagai tokoh-tokoh pendukungnya. Hirschman mengemukakan bahwa strategi pembangunan harus konsentrasi pada beberapa sektor dari pada proyek yang tersebar luas; sektor kunci ditentukan dengan mengukur dampak backward linkage dan forward linkage yang memaksimalkan input-output. Pertumbuhan dijalankan dari sektor-sektor ekonomi unggulan ke sector-sektor lainnya dari satu perusahaan ke yang lain. Keuntungan dari pendekatan ini dibandingkan “pertumbuhan berimbang” adalah lebih ekonomi dalam pemakaian sumberdaya yang langka.

2.1.10. Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Menurut Tarigan (2007) pusat pertumbuhan dapat di artikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur – unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik kedalam maupun keluar (wilayah belakangnya). Secara geografis adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole*

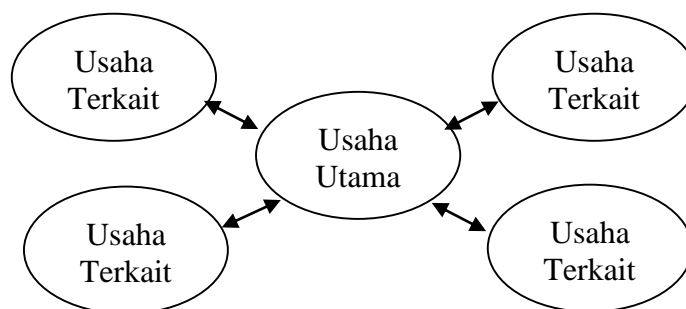
of attraction) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu Sebagai Berikut:

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.
2. Ada efek pengganda, keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan daerah belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari daerah belakangnya akan meningkat juga.
3. Adanya konsentrasi geografis, konsentrasi berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Sehingga dapat meningkatkan *economic of scale*.
4. Bersifat mendorong wilayah belakangnya, Hal ini berarti kota dan daerah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Beberapa hal yang dapat dicapai melalui konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru (Samsudin, 2003) anatar lain adalah:

1. Pendapatan daerah secara keseluruhan akan meningkat dan merata seperti yang dikatakan Richardson bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan akan mencapai maksimal apabila pembangunan dipusatkan di pusat-pusat pertumbuhan daripada pembangunan itu dipencar-pencar secara terpisah di seluruh daerah.
2. Penyediaan prasarana dan perumahan lebih mudah dan murah apabila dipusatkan pada titik-titik pertumbuhan daripada terpencar.
3. Yang terpenting adalah titik pertumbuhan baru dapat menampung tenaga kerja sehingga persoalan pengangguran di pusat utama maupun daerah sekitarnya dapat ditanggulangi.
4. Titik-titik pertumbuhan dapat berfungsi sebagai pembendung arus pendatang ke pusat utama karena umumnya pendorong arus migrasi adalah rendahnya tingkat kehidupan. Dengan demikian arus migrasi ke pusat utama dapat dibendung di titik ini.
5. Konsentrasi penduduk tidak terjadi pada pusat utama saja sehingga beban kota utama dalam penyediaan fasilitas dan lapangan kerja dapat dikurangi.

Gambar 2.4
Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan



Sumber: Sjahrizal, 2008

2.1.11. Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru

Untuk menentukann dan mengembangkan sebuah pusat pertumbuhan secara baik dan terarah, maka diperlukan beberapa langkah atau tahapan dalam kegiatan yang saling berkaitan satu sama lainnya antara daerah pusat pertumbuhan dan daerah dibelakangnya (*hinterland*). Untuk itu, dalam pelaksanaan penentuan dan pengembangan suatu wilayah perlu dilakukan secara berurutan mulai dari kegiatan pertama sampai dengan terakhir.

Adapun tahapan atau langkah – langkah dalam pentuan dan pengembangan pusat pertumbuhan suatu daerah menurut Sjahrizal (2008) menyebutkan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan lokasi pusat pertumbuhan dengan memperhatikan berbagai keuntungan lokasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini perhatian pertama perlu diarahkan pada ketersediaan jaringan jalan yang dapat menjangkau seluruh wilayah cangkupan. Langkah kedua adalah meneliti potensi ekonomi wilayah terkait berikut komoditas unggulan yang sudah dimiliki dan atau potensial untuk dikembangkan. Langkah ketiga meneliti keterkaitan hubungan input output dari masing-masing industri dan kegiatan potensial dikembangkan pada pusat pertumbuhan bersangkutan. Langkah keempat menentukan jenis sarana prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan tersebut. Langkah kelima merupakan langkah terakhir adalah membentuk sebuah organisasi yang akan mengelola dan mengkoordinasi komplek industri atau pusat pertumbuhan tersebut.

2.2. Penelitian Terdahulu

Renhard Gultom (2013) melakukan penelitian tentang *Analisis Penetapan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Samosir*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan menggunakan metode LQ untuk melihat sektor basis dalam wilayah Kabupaten Samosir kemudian metode *Shift Share* untuk melihat sektor yang dapat dikembangkan di Kabupaten Samosir. Sedangkan untuk potensi ekonomi setiap kecamatan menggunakan metode campuran. Teknik yang kedua adalah metode gravitasi untuk melihat interaksi spasial antar kecamatan. Sedangkan teknik ketiga adalah metode skalogram untuk menentukan pusat pelayanan dan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan: (1) sektor basis di Kabupaten Samosir adalah pertanian dengan nilai LQ 2,8 dan dari potensi masing – masing kecamatan semuanya adalah sektor pertanian. (2) interaksi spasial yang kuat terjadi di kecamatan Pangruruan, dan Nainggolan. (3) Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 Wilayah Pembangunan yang dapat ditetapkan di Kabupaten Samosir antara lain Wilayah Pembangunan I (WP I) yang meliputi Kecamatan Pangruruan, Kecamatan Sianjurnulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Ronggurnihuta, Wilayah Pembangunan II (WP II) yang meliputi Kecamatan Simanindo, Wilayah Pembangunan III (WP III) yang meliputi Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Onanrunggu dan dan Kecamatan Sitiotio.

Kemudian penelitian yang berjudul *Analisis Kinerja Fungsi Perkotaan Suruh dan Tengar sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan Selatan Kabupaten Semarang* Disusun oleh Risky Dwi Afriadi tahun 2014. Latar belakang dari

penelitian ini adalah ketimpangan wilayah masih terjadi di Kawasan Selatan sehingga kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut masih tertinggal dibanding wilayah lain. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode Deskriptif dan Eksploratif. Hasil analisis menunjukkan: (1) Hasil penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas pelayanan di Kawasan Selatan sudah memadai untuk bidang perekonomian dan peribadatan. Namun, untuk fasilitas kesehatan jumlahnya masih kurang kecuali puskesmas (2) Analisis interaksi kewilayahan menunjukkan bahwa fungsi perkotaan Suruh dan Tenganan sebagai pusat pengembangan belum mampu menjadi penarik bagi masyarakat di Kawasan Selatan. Masyarakat lebih memilih berinteraksi dengan daerah lain seperti Salatiga dan Boyolali dalam menggunakan fasilitas pelayanan

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sasya Danastri pada tahun 2011 berjudul Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pertumbuhan Kota Cirebon yang pesat membuat kegiatan cenderung berorientasi di pusat kota, sehingga pusat kota semakin padat (gedung dan kegiatan bisnis) dan semakin macet (arus lalu lintas). Daerah sekitar pusat kota utama ini harus direncanakan sebagai kota mandiri dan diharapkan kehidupan ekonominya tidak bergantung pada kegiatan perekonomian pusat kota utama, adanya ketimpangan pembangunan atau pembangunan yang tidak merata antara kawasan Cirebon Utara dan kawasan Cirebon Selatan. Alat analisisnya adalah Analisis Basis Ekonomi dengan Metode Langsung, Analisis Gravitasi, Analisis Skalogram, dan Metode

Overlay. Hasil Analisisnya menunjukkan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukarta, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja, Klampok dan Susukan. Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat dengan kecamatan hinterlandnya berbeda-beda. Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relatif tertinggal. Sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Sementara itu dari penelitian yang terakhir berjudul Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara ditulis oleh Refika Ardila pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan, interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya, kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Analisis yang digunakan adalah analisis skalogram dan indeks sentralitas, metode gravitasi, analisis tipologi klassen dan analisis Location Quotient. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh. Diperoleh pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukarta, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja, Klampok dan Susukan. Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat dengan kecamatan hinterlandnya berbeda-beda. Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relatif tertinggal. Sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Variabel dan Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|--|
| 1 | <p><i>ANALISIS PENETAPAN WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SAMOSIR.</i> Disusun oleh Renhard Gultom, 2013</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kondisi Kabupaten Samosir dilihat dari sektor basis ekonomi • Mengetahui potensi daerah yang dapat dikembangkan di tiap – tiap kecamatan. • Mengetahui kekuatan interaksi • Mengetahui kecamatan yang dapat di jadikan pusat pertumbuhan • Mengetahui berapa banyak wilayah pembangunan dan pusat pertumbuhan di | <p>Variabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi Ekonomi • Interaksi Spasial • Pusat Pelayanan • Pusat Pertumbuhan <p>Metode Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Location Quotient • Analisis ShiftShare • Metode Campuran • Analisis Gravitasi • Analisis Skalogram | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 3 Wilayah Pembangunan yang dapat ditetapkan di Kabupaten Samosir antara lain Wilayah Pembangunan I (WP I) yang meliputi Kecamatan Pangururan, Kecamatan Sianjurnulamula, Kecamatan Harian dan Kecamatan Ronggurnihuta, Wilayah Pembangunan II (WP II) yang meliputi Kecamatan Simanindo, Wilayah Pembangunan III (WP III) yang meliputi Kecamatan Nainggolan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Onanrunggu dan dan Kecamatan Siotio. |

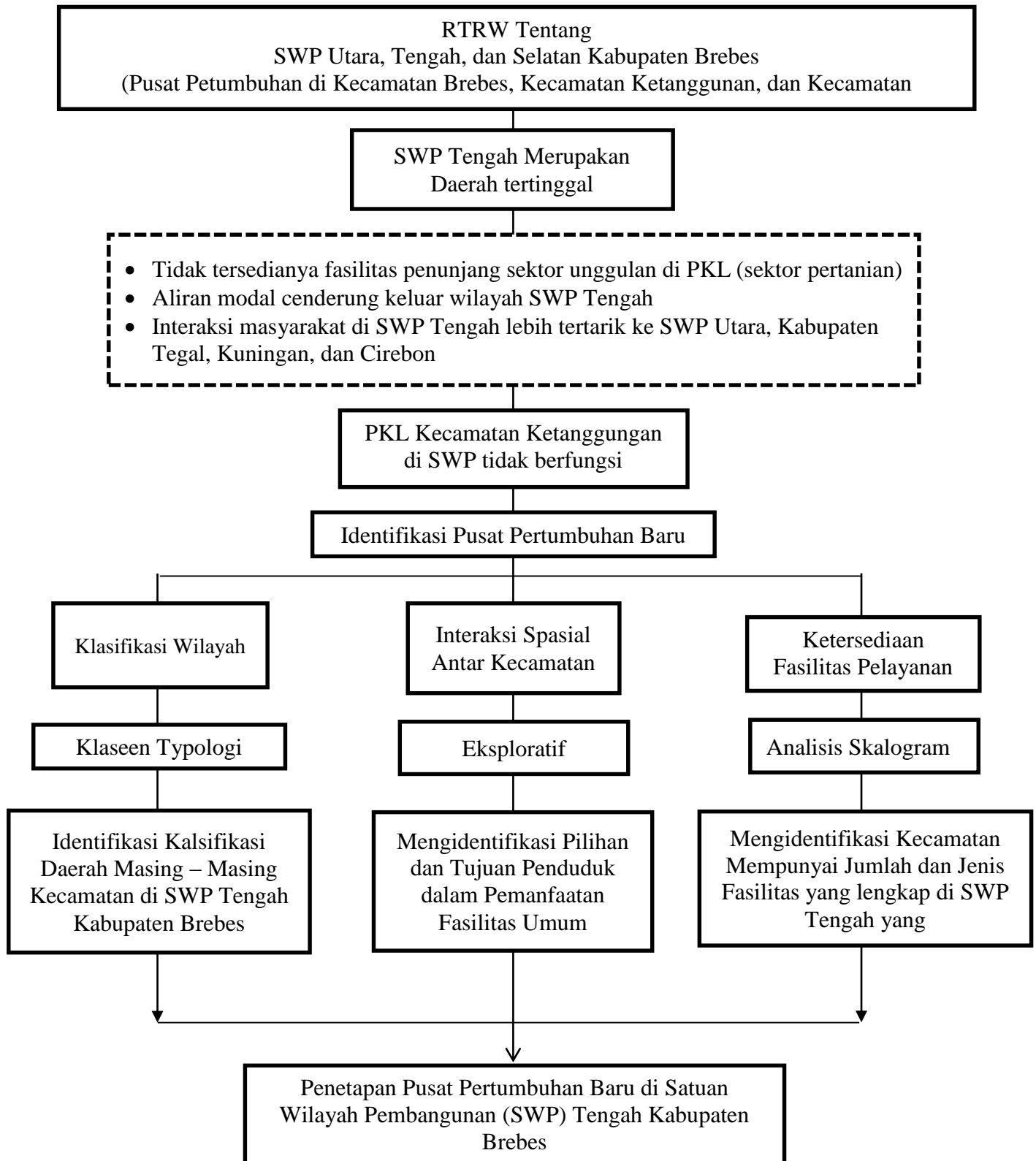
| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | Kabupaten Samosir serta wilayah mana saja yang masuk ke dalamnya | | |
| 2 | <i>ANALISIS KINERJA FUNGSI PERKOTAAN SURUH DAN TENGARAN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN SELATAN KABUPATEN SEMARANG.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan publik di Kawasan Selatan. • Mengidentifikasi kondisi prasarana fisik perkotaan Suruh dan Tengaran. • Mengetahui interaksi keruangan masyarakat di Kawasan Selatan. • Menganalisis kinerja fungsi perkotaan Suruh dan | <p>Variabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Fungsi Kota • Ketersedian Fasilitas Pelayanan • Interaksi Spasial • Prasarana Fisik Perkotaan <p>Metode Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif • Eksploratif | <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas pelayanan di Kawasan Selatan sudah memadai untuk bidang perekonomian dan peribadatan. Namun, untuk fasilitas kesehatan jumlahnya masih kurang kecuali puskesmas. • Analisis interaksi kewilayahan menunjukkan bahwa fungsi perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusat pengembangan belum mampu menjadi penarik bagi masyarakat di Kawasan Selatan. Masyarakat lebih memilih berinteraksi dengan daerah lain seperti |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Disusun oleh Risky Dwi Afriadi, 2014 | Tengaran sebagai pusat pengembangan Kawasan Selatan Kabupaten Semarang. | | Salatiga dan Boyolali dalam menggunakan fasilitas pelayanan |
| 3 | <i>ANALISIS PENETAPAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI KECAMATAN HARJAMUKTI, CIREBONSELATAN.</i> Disusun oleh Sasya Danastri, 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kondisi terkini di Kecamatan Harjamukti dilihat dari aspek ekonomi, aspek kependudukan dan aspek fasilitas pelayanan public • Bagaimana interaksi antar kelurahan dikecamatan Harjamukti • Kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk | <p>Variabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan Interaksi • Ketersedian Fasilitas • Potensi Ekonomi <p>Metode Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Basis Ekonomi dengan metode langsung • Analisis gravitasi • Analisis skalogram • Metode overlay | <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Kecapi berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, kesehatan karena kelengkapan fasilitasnya • Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah karena merupakan ibu kota kecamatan, dan pusat pemukiman, dandaerah wisata rohani • Kelurahan Harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan lahan |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | | <p>mengembangkan pusat pertumbuhan di Kecamatan Harjamukti dilihat dari aspek ekonomi, aspek kependudukan dan aspek fasilitas pelayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pembangunan apa saja yang dapat ditetapkan sebaga pusat pertumbuhan tersebut di Kecamatan Harjamukti. | | <p>kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan dan jasa, karena jaraknya yang sangat dekat dengan KelurahanKecapi • Kelurahan Argasunya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya berpotensi untuk lahan perkebunan dan peternakan |
| 4 | <p><i>PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui Kecamatan - kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan | <p>Variabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB Pusat Pertumbuhan • PDRB per Kapita | <ul style="list-style-type: none"> • Diperoleh pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukarta, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja, Klampok dan Susukan. |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | <p><i>KABUPATEN BANJARNEGARA</i></p> <p>Disusun oleh Refika Ardila, 2012</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya • Mengetahui kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> • Laju Pertumbuhan Ekonomi <p>Metode Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Skalogram • Indeks Sentralitas • Metode Gravitasi • Analisis Tipologi • Klassen • Analisis LQ | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat dengan kecamatan hinterlandnya berbeda-beda • Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relatif tertinggal • Sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. |
|--|--|---|---|--|

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang variabel – variabel yang menunjukkan suatu arti yang membedakan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Adapun beberapa variabel - variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi wilayah dalam hal ini wilayah/daerah kecamatan – kecamatan yang ada di SWP Tengah Kabupaten Brebes. Klasifikasi ini mengacu pada analisis Tipologi Klassen yang membagi menjadi 4 kategori daerah, yaitu daerah maju dan tumbuh cepat, daerah berkembang, daerah maju tapi tertekan, dan daerah relatif tertinggal. Klasifikasi ini didasarkan pada dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan PDRB dan rata-rata pendapatan per kapita di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB pertahun yang dihitung dengan total PDRB tahun akhir dikurangi total PDRB pada tahun awal dibagi total PDRB pada tahun awal dikalikan seratus persen dengan hasil dalam presentase. Sementara itu rata-rata pendapatan per kapita adalah rata – rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah/daerah yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.
2. Interaksi spasial adalah hubungan atau kontak yang saling mempengaruhi dan terjadi antardaerah, beserta hasil hubungannya. Yaitu, pergerakan penduduk diukur dengan pilihan dan tujuan masyarakat Kecamatan – kecamatan di SWP

Tengah dalam memanfaatkan fasilitas - fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

3. Pusat pelayanan adalah konsentrasi pemukiman penduduk dan beberapa fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial sehingga intensitas kegiatan arus barang dan manusia ke pusat-pusat tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pusat pelayanan ditentukan dengan analisis skalogram dengan memperhatikan jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut, jumlah fasilitas pelayanan umum yang tersedia, dan jumlah jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia.
4. Pusat Pertumbuhan dalam penelitian ini, pusat pertumbuhan ditentukan berdasarkan pusat pelayanan dengan menggunakan analisis skalogram dan interaksi spasial dengan analisis interaksi keruangan antar kecamatan

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. adapun data primer bersumber dari berbagai pihak seperti:
 - a. Wawancara langsung pihak terkait yang akan dijadikan sampel yaitu tentang interaksi ekonomi dengan komunikasi langsung dengan Staf Subbagian Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah BAPPEDA Kabupaten Brebes, Camat/Staf Kecamatan, dan beberapa masyarakat yang kebetulan ditemui di masing – masing kecamatan di SWP Tengah dan pengamatan langsung melalui peninjauan secara langsung dengan cermat

di lapangan dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk melihat interaksi spasial yang ada dari pergerakan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang berupa catatan atau laporan yang telah dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian bersumber dari :

- a. BAPPEDA Kabupaten Brebes: RTRW Kabupaten Brebes dan Peta Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Kabupaten Brebes, dan Kecamatan – kecamatan yang ada di dalamnya.
- b. BPS Kabupaten Brebes: Kabupaten Brebes Dalam Angka, data PDRB ADHK tahun 2000, PDRB per kapita, dan Jumlah Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Brebes. Kecamatan – kecamatan Dalam Angka, data ketersediaan fasilitas (kesehatan, pendidikan, perekonomian, peribadatan, sarana prasarana transportasi dan wisata)
- c. Kecamatan – kecamatan dalam wilayah studi yaitu di SWP Tengah: Data Monografi Kecamatan
- d. Sumber lain yang dapat dimanfaatkan sebagai data sekunder berupa studi literatur, referensi, dan artikel – artikel.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan observasi lapangan dan wawancara langsung sedangkan data skunder dikumpulkan melalui studi pustaka.

Yang secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mewawancarai langsung responden yang akan dijadikan sampel untuk memperoleh data yang dibutuhkan

dengan bantuan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun narasumber terkait seperti staf subbagian bidang pengembangan infrastruktur wilayah BAPPEDA, pihak - pihak kecamatan dan masyarakat studi.

2. Observasi atau metode pengamatan langsung, yaitu metode pengumpulan data melalui peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan dengan mengunjungi lokasi penelitian.
3. Metode studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAPPEDA

3.4. Metode Analisis

3.4.1. Analisis Typologi Klassen

Analisis ini digunakan untuk melihat kondisi dan klasifikasi daerah kecamatan – kecamatan di SWP Tengah, yaitu Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Songgom.

Menurut Sjafrizal (1997) Analisis ini didasarkan pada dua indikator utama yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita di suatu daerah. Analisis ini membagi empat klasifikasi daerah yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yaitu:

- a. Kuadran I yaitu daerah maju dan cepat tumbuh merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata daerah di atasnya.

- b. Kuadran II yaitu daerah maju tapi tertekan merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tapi pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding rata-rata daerah di atasnya.
- c. Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tapi pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding rata-rata daerah di atasnya.
- d. Kuadran IV yaitu daerah tertinggal yang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya lebih rendah dibanding daerah di atasnya.

Tabel 3.1
Pengelompokan Pembangunan Klasifikasi Klassen

| | |
|---|---|
| Kuadran I Maju dan Tumbuh Pesat $y_1 > y ; r_1 > r$ | Kuadran II Maju Tapi Tertekan $y_1 < y ; r_1 > r$ |
| Kuadran III Berkembang $y_1 > y ; r_1 < r$ | Kuadran IV Tertinggal $y_1 < y ; r_1 < r$ |

Sumber: Sjafrizal, 1997

3.4.2. Interaksi Spasial secara Eksploratif

Analisis interaksi spasial ini digunakan untuk mengetahui interaksi antar kecamatan – kecamatan di SWP Tengah. Menurut Risky (2014) metode Ekploratif dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan Camat/Staf pemerintahan masing – masing kecamatan di SWP Tengah untuk melihat interaksi keruangan masyarakat di lokasi studi dengan melihat arus pergerakan penduduk daerah tersebut dalam pemanfaatan fasilitas umum.

Dalam penelitian ini, analisis untuk melihat arus pergerakan penduduk dalam pemanfaatan fasilitas yang ada di SWP Tengah yaitu dengan melihat dari kondisi

fasilitas yang ada, aksesibilitas untuk mencapai tempat fasilitas tersebut, dan beberapa alasan masyarakat kenapa lebih memilih memanfaatkan fasilitas tersebut. Adapun jenis fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.

3.4.3. Skalogram

Menurut Gultom (2013) Analisis Skalogram dipergunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hierarki atau orde-orde pusat pertumbuhan. Analisis ini dapat digunakan dengan mendasarkan kepada jumlah unit dan jenis fasilitas yang ada yang dijabarkan dalam tabel yang berisi fasilitas sarana dan prasarana per kecamatan yang ada di SWP Tengah dengan menandai angka “1” menunjukkan daerah yang mempunyai fasilitas, sedangkan angka “0” menunjukkan daerah yang tidak mempunyai fasilitas. Analisis skalogram mendasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu:

- a. *Differentiation* adalah fasilitas perekonomian yang menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota.
- b. *Solidarity* adalah fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan.
- c. *Centrality* adalah fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hierarki.

Analisis skalogram pada penelitian ini menggunakan 29 objek dan 6 subjek.

Subjek yang digunakan adalah 6 kecamatan dan objeknya adalah:

1. Fasilitas Pendidikan (TK, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK, Kursus, dan Perguruan Tinggi)
2. Fasilitas Kesehatan (RS, Rumah Bersalin, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Klinik Pengobatan, Dokter Praktek, Bidan Praktek, dan Dukun Bayi).
3. Fasilitas Peribadatan (Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, dan Gereja)
4. Fasilitas Ekonomi (Koperasi, KUD/BUUD, Pertokoan, Badan Pengkriditan, Pasar Hewan, Pasar Umum, dan Sentra Pengepul/Lambung Pasar bawang).
5. Fasilitas Pendukung (Hotel, Terminal, Angkot/Angkudes dan Pariwisata).

Menurut Tarigan (2007) untuk menentukan banyaknya kelas dari kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, digunakan metode Sturgess dengan rumus:

$$k = 1 + 3.3 \text{ Log } n \dots\dots\dots (3.1)$$

Kecamatan yang termasuk dalam kelas/orde 1 merupakan merupakan daerah dengan tingkat fasilitas paling tinggi, sedangkan kelas/orde yang terakhir adalah daerah tingkat fasilitas paling rendah. Adapun kelas/orde ini diurutkan sesuai dengan jumlah dan jenis fasilitas dari daerah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas paling lengkap sampai dengan daerah dari daerah yang mempunyai jumlah dan jenis fasilitas paling sedikit sesuai dengan interval masing – masing kelas. Untuk menentukan besarnya interval kelas yaitu dengan cara:

$$I = \frac{A-B}{k} \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

I: Interval Dimana n: banyaknya kecamatan B: Jumlah fasilitas terendah
k: banyaknya kelas A: jumlah fasilitas tertinggi